



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 12(2), 219-232



RESEARCH ARTICLE

JAVA INSTITUUT: IMPLEMENTASI INTELEKTUAL LOKAL DAN KOLONIAL DALAM MEMAJUKAN KEBUDAYAAN SUNDA (1921-1941)

Kiki Rizki Fauzi, Erlina Wiyanarti, Iing Yulianti

Program Studi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

kikirizki3@upi.edu

To cite this article: Fauzi, K. R., Wiyanarti, E., & Yulianti, I. (2023). Java instituit: implementasi intelektual lokal dan kolonial dalam memajukan kebudayaan sunda 1921-1941. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 12(2), 219-232. <https://doi.org/10.17509/factum.v12i2.61701>.

Abstract

The Dutch have studied indigenous society and culture since the 19th century. The Dutch researched the Javanese language, Malay, and ancient manuscripts through its scholars. The lack of indigenous participation in studying and researching their knowledge system and culture allowed the Dutch to instill power in the field of culture. In the early 20th century, the study of society and culture began to involve the natives, marked by the establishment of the Java Institute. Java Institute's openness to cultural advancement efforts can be seen in cooperation between local and colonial intellectuals. This research aims to analyze the role of Java Instituut in advancing Sundanese culture from 1921 to 1941. The research method used is the historical method, which consists of the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Through this research, it can be seen the strategic steps of Java Instituut in advancing Sundanese culture, namely: 1) Promoting Sundanese tunil (opera); 2) Publishing Sundanese magazines; 3) Organizing Sundanese language congresses; and 4) Establishing arts and crafts schools.

Abstrak

Kajian mengenai masyarakat dan budaya pribumi telah dilakukan oleh Belanda sejak abad ke-19. Melalui para sarjananya, Belanda melakukan penelitian terhadap bahasa Jawa, Melayu dan manuskrip kuno. Minimnya partisipasi pribumi dalam mengkaji dan meneliti sistem pengetahuan dan kebudayaannya memberikan peluang bagi Belanda untuk menanamkan kekuasaan di bidang kebudayaan. Pada awal abad ke-20, pengkajian terhadap masyarakat dan kebudayaan mulai melibatkan kaum pribumi. Hal ini ditandai dengan berdirinya Java Instituut. Keterbukaan Java Instituut terhadap upaya pemajuan kebudayaan terlihat dalam keberadaan kerja sama antara intelektual lokal dan kolonial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Java Instituut dalam memajukan kebudayaan Sunda tahun 1921-1941. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis yang terdiri dari tahap heuristik, kritik sumber interpretasi dan historiografi. Melalui penelitian ini dapat diketahui langkah strategis Java Instituut dalam memajukan kebudayaan Sunda, yaitu: 1) Mempromosikan tunil (opera) Sunda; 2) Menerbitkan majalah bernuansa ke-Sundaan; 3) Menyelenggarakan kongres bahasa Sunda; dan 4) Mendirikan sekolah kesenian dan kerajinan tangan.

© 2023 Universitas Pendidikan Indonesia

Article Info

Article History:
Received 11 Mei 2021
Revised 16 July 2022
Accepted 28 June 2023
Available online 1 October 2023

Keyword:

Java Instituut,
Culture Promotion,
Sundanese Culture.

PENDAHULUAN

Pada awal abad ke-20, kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubahan ke arah yang paling mendasar. Kebijakan kolonial Belanda tersebut kini mempunyai tujuan baru. Eksploitasi terhadap Indonesia mulai kurang dijadikan sebagai alasan utama kekuasaan Belanda dan digantikan dengan pernyataan-pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia. Kebijakan ini dinamakan dengan 'Politik Etis' (Ricklefs, 2005, hlm. 320). Pada permulaannya, kata "kemajuan" menjadi sangat populer tidak hanya sebagai cita-cita tetapi telah menjadi *zeitgeist* (jiwa zaman) dari periode pelaksanaan kebijakan tersebut. Politik Etis membawa tidak rencana strategis, yaitu edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan) dan emigrasi (perpindahan penduduk) (Poesponegoro & Notosusanto, 2010, hlm. 24). Dari ketiga rencana tersebut masyarakat Hindia Belanda dihadapkan pada proses mobilitas sosial yang cukup tinggi.

Pada ranah pendidikan, kaum pribumi mempunyai kesempatan untuk mendapat pengajaran di sekolah-sekolah, walaupun masih terbatas pada kelas-kelas sosial tertentu. Proses pendidikan yang diberikan kepada masyarakat pribumi kemudian memunculkan suatu kelompok sosial baru yang dinamakan dengan golongan intelektual. Niel (1984, hlm., 12). menamakan kelompok sosial yang mendapatkan pendidikan Barat ini sebagai "elite modern". Kemunculan jenis elite baru ini mampu menggeser elite tradisional yang berorientasi kosmologis dan berdasarkan keturunan kepada elite modern yang berorientasi pada kemakmuran negara dan pendidikan.

Perubahan kebijakan pemerintah kolonial Belanda awal abad ke-20 yang dapat dikatakan lebih humanis pada dasarnya tidak mengubah kepentingan pemerintah terhadap praktik kolonialisme. Hal yang ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Gandhi (1998, hlm. 15) bahwa kolonialisme di Indonesia memiliki dua aspek kekuasaan. *Pertama*, kekuasaan secara fisik, yaitu dengan menguasai tatanan politik

atau ekonomi suatu wilayah. *Kedua*, adalah kekuasaan pada kebudayaan. Kekuasaan secara fisik diperoleh melalui eksploitasi sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan tertentu. Sementara itu, penguasaan terhadap kebudayaan diperoleh melalui upaya diplomatis yaitu menyesuaikan diri dengan nilai dan sistem pengetahuan masyarakat pribumi.

Aspek kedua yang menjadi corak kolonialisme di Indonesia tersebut pada dasarnya berkaitan dengan kepentingan untuk menanamkan kekuasaan secara fisik. Oleh sebab itu, banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk belajar mengenai kebudayaan pribumi. Hal ini selaras dengan yang dijelaskan oleh Alatas (1998, hlm. 19) bahwa kegiatan kajian ilmu pengetahuan terhadap masyarakat pribumi biasanya bersamaan dengan praktik penguasaan terhadap wilayah jajahannya. Proses pengkajian terhadap masyarakat pribumi, khususnya Jawa telah dilakukan oleh Belanda sejak berakhirnya Perang Jawa (1825-1830). Melalui para intelektualnya, pemerintah kolonial Belanda melakukan pendalaman terhadap bahasa Jawa, Melayu, dan kajian terhadap manuskrip kuno (Tsuchiya, 1990, hlm. 79).

Pada tahun 1832 Belanda membentuk lembaga bahasa Jawa di Surakarta, yaitu *Instituut voor de Javaansche Taal*. Lembaga tersebut didirikan atas prakarsa Friedrich Carl Gericke yang sekaligus menjadi pimpinan lembaga. Melalui *Instituut voor de Javaansche Taal* cara pandang baru ditanamkan ke dalam pemikiran orang Jawa. Para Javanolog Belanda yang terdiri dari kalangan misionaris dan orientalis, mengembalikan dan menghidupkan kembali tradisi Jawa Kuno. Pergeseran studi tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan upaya Belanda untuk menggeser pengaruh Islam dan memperdalam kajian tentang Jawa (Tsuchiya, 1990, hlm. 84). Minimnya partisipasi pribumi dalam mengkaji dan meneliti sistem pengetahuan dan kebudayaannya meningkatkan peluang bagi Belanda untuk mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

Memasuki abad ke-20, upaya pengkajian terhadap masyarakat dan budaya lokal mulai melibatkan partisipasi pribumi. Hal ini ditandai dengan didirikannya lembaga studi kebudayaan bernama *Java Instituut*. Gagasan untuk mendirikan lembaga kebudayaan lahir dari mosi Kongres Kebudayaan Jawa 1918. Stokvis, Darnakoesoema, Moojen, Joekes, Moh. Zain dan Tjipto Mangoenkoesoemo adalah tokoh yang mengajukan mosi tersebut. Mosi yang diajukan oleh kelima tokoh di atas disepakati secara aklamasi oleh seluruh peserta kongres (Djajadiningrat dkk. 1921, hlm. 325). Realisasi untuk mendirikan lembaga kebudayaan tersebut baru terwujud di tahun 1919. Tepatnya pada tanggal 4 Agustus diselenggarakan rapat pembentukan Java Instituut di Gedung Mataram Yogyakarta (*Bataviaasch Nieuwsblaad*, 1919).

Pendirian Java Instituut mendapat respon positif dari pemerintah kolonial. Melalui Direktur Urusan Pendidikan dan Keagamaan, mereka menyatakan simpati terhadap lembaga tersebut. Agenda rapat pendirian *Java Instituut* terdiri dari pembahasan AD/ART serta pemilihan dewan ketua dan dewan pengurus. Pada awalnya, nama dari lembaga ini adalah *Instituut voor de bestudeerlag van de Java Cultuur* (Lembaga untuk Studi Kebudayaan Jawa). Tetapi usul tersebut tidak disetujui oleh beberapa peserta rapat. Setelah melalui diskusi dan pemungutan suara kemudian diubah menjadi Java Instituut (*Bataviaasch Nieuwsblaad*, 1919). Hoesein Djajadiningrat terpilih sebagai ketua dari Java Instituut. Sementara itu, ketua kehormatan diisi oleh Mangkunegara VII. Berdasarkan AD/ART, tujuan dari Java Instituut adalah untuk memajukan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura, dan Bali (*Java Instituut*, 1919).

Secara resmi Java Instituut mendapat status sebagai badan hukum pada bulan Desember 1919, setelah disahkannya AD/ART dan struktur kepengurusan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda (*De Locomotief*, 1919). Dewan pengurus *Java Instituut* melibatkan kelompok intelektual pribumi dan Belanda.

Samuel Koperberg didaulat menjadi sekretaris merangkap bendahari dari Java Instituut. Sementara itu, dewan pengurus terdiri dari F.D.K. Bosch, P.J. Gerke, B. Schrieke, Moojen, J.W. Teillers, Ter Haar, K.P.A. Hadiwijoyo VII, Ir. Th. Karsten, H.J. Kiewet de Jonge, van Lith, K.P.A. Soeriodiningrat, Koesoemo Oetojo, Tjokroningrat, R. Sastrowidjono, Poerbatjaraka dan HOS. Tjokroaminoto (Djajadiningrat, 1921, hlm. 65).

Pada penelitian yang berjudul *Sejarah Java Instituut dalam Perspektif Discourse Orientalis (1919-1941)* karya Christian Wahyu Wijayanto (2006), dijelaskan bahwa Java Instituut merupakan representasi dari wacana orientalisme. Penelitian dalam bentuk skripsi ini tidak secara rinci menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *Java Instituut* dalam mendorong perkembangan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura, dan Bali. Penelitian ini lebih banyak menjelaskan hasil pemikiran tokoh-tokoh *Java Instituut* mengenai kebudayaan berdasarkan analisis wacana terhadap Djawa. Tetapi, melalui penelitian ini dapat diketahui posisi *Java Instituut* sebagai lembaga kebudayaan yang mengedepankan kolaborasi antara intelektual pribumi dan Belanda.

Sementara itu, pada penelitian yang berjudul *Gending Karesmen: Teater Tradisional Menak di Priangan (1904-1942)* karya Abdullah dkk, dapat diketahui bahwa masyarakat Sunda terinspirasi oleh Perkumpulan Tonil Braga (*Toneelvereniging Braga*) untuk mengembangkan kesenian tunil (operas). Oleh orang Sunda, tonil dikolaborasikan dengan kesenian asli mereka, yaitu tembang. Perpaduan antara keduanya menghasilkan tunil tembang yang menjadi ciri khas dari kesenian Sunda. Pementasan tunil tembang pada perkembangannya menjadi ajang hiburan bagi elite Sunda (ménak). Oleh Java Instituut, kesenian jenis ini mendapatkan perhatian lebih. Hal ini terbukti dengan dipromosikannya tunil tembang pada Kongres Kebudayaan 1921.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, perlu dilakukan kajian lanjutan untuk

meninjau berbagai aktivitas oleh Java Instituut dalam memajukan perkembangan kebudayaan, khususnya kebudayaan Sunda. Dengan adanya penelitian ini diharapkan sumber bacaan mengenai sejarah kebudayaan di Indonesia menjadi bertambah. Mengingat keberadaan Java Instituut sendiri tidak sepopuler organisasi atau lembaga lain lain yang kita tahu tercantum dalam buku sejarah nasional ataupun dalam sumber bacaan lain menjelaskan periode pergerakan nasional.

Penulis sebagai mahasiswa program studi pendidikan sejarah, menyadari bahwa kajian terhadap sejarah kebudayaan dirasa masih sangat kurang. Pasalnya, selama ini dalam mempelajari sejarah cenderung mengkaji dari perspektif politik. Oleh sebab itu, kaitannya dengan pembelajaran sejarah Indonesia, penelitian *Java Instituut* ini diharapkan dapat memperkaya materi dalam Kompetensi Dasar 3.3 tentang menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini.

Periode yang ditentukan dalam penelitian ini adalah 1921-1941. Tahun 1921 merujuk pada dimulainya kiprah *Java Instituut* dalam menyelenggarakan kegiatan berbasis keilmuan dan kebudayaan. Sementara itu, tahun 1941 menjadi batas akhir dari penelitian yang merujuk pada mulai meredupnya eksistensi Java Instituut. Hal ini dibuktikan dengan dihentikannya beberapa kegiatan *Java Instituut*, seperti penerbitan majalah, kongres bahasa dan kebudayaan, dan pertunjukan kesenian. Kajian dalam penelitian ini akan difokuskan pada langkah strategis *Java Instituut* dalam memajukan kebudayaan Sunda.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Langkah-langkah metode sejarah yang digunakan mengacu pada penjelasan (Ismaun, dkk. 2016) yaitu terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, penulis berkunjung

ke beberapa tempat yang dianggap mampu menghadirkan sumber-sumber sejarah yang diperlukan. *Pertama*, penulis mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan mendapat AD/ART *Java Instituut* yang diterbitkan tahun 1919 di Yogyakarta. Di ANRI, penulis juga mendapatkan majalah *Djawa* (1921-1941) dan majalah *Poesaka Soenda* (1922-1929) yang dikelola oleh *Java Instituut*. Selanjutnya, penulis mendapatkan surat kabar *De Locomotief* (1919, Desember) dan *Bataviaasch Nieuwsblad* (1919, Agustus 7) dari Delpher. *Kedua*, penulis mengunjungi Perpustakaan Nasional RI dan mendapatkan buku *Nusa Jawa Silang Budaya* Jilid 1 karya Denys Lombard, buku *Munculnya Elit Modern* di Indonesia karya Robert van Niel dan buku *Nationalisme and Ethnic Conflict in Indonesia* karya J. Bertrand.

Pada tahap selanjutnya, penulis melakukan kritik sumber. Sumber yang dikritik oleh penulis adalah *Majalah Djawa* dan *Majalah Poesaka Soenda*. Ditinjau dari tahun penerbitannya, majalah ini menunjukkan angka tahun yang sama dengan operasionalisasi Java Instituut. Kemudian, tulisan dalam majalah ini ditulis menggunakan mesin ketik. Hal ini dapat dilihat dari tinta serta font yang digunakan sesuai dengan penggunaan mesin ketik. *Majalah Djawa* ditulis dalam bahasa Belanda, sementara itu majalah *Poesaka Soenda* ditulis dalam bahasa Sunda. Keduanya masih menggunakan ejaan van Ophuijsen. Selanjutnya, kedua majalah ini diinterpretasikan bersamaan dengan berbagai sumber lain yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, historiografi dalam artikel ini adalah “*Java Instituut: Implementasi Intelektual Lokal dan Kolonial dalam Memajukan Kebudayaan Sunda (1921-1941)*”.

PEMBAHASAN

1. Dari Panggung ke Panggung: Promosi Kesenian Sunda oleh Java Instituut (1921)

Sejak awal didirikan hingga tahun 1942, Java Instituut telah menyelenggarakan lima kali kongres kebudayaan dan tiga kali kongres

bahasa. Kongres kebudayaan dimulai pada tahun 1921, 1924, 1926, 1929, dan 1937. Sementara itu, kongres bahasa yang ditujukan untuk bahasa Jawa dan Sunda diselenggarakan pada tahun 1924, 1927, dan 1936. Pelaksanaan kongres kebudayaan yang erat kaitannya dengan budaya Sunda adalah kongres tahun 1921. Selain karena tempat pelaksanaannya di Bandung, pada kongres itu juga banyak menampilkan kesenian khas Sunda. Hal yang sama dapat ditemukan pada setiap agenda kongres bahasa Sunda. Pengurus Java Instituut selalu menyisipkan penampilan-penampilan dari para seniman Sunda. Selain digunakan sebagai ajang hiburan, kegiatan tersebut juga dipercaya dapat mempromosikan kesenian Sunda. Mengingat dalam setiap penyelenggaraan kongres terdapat antusiasme yang besar dari setiap lapisan masyarakat.

Pada kongres kebudayaan 1921 topik yang dibahas adalah pengajaran sejarah dan perkembangan musik Jawa. Kongres ini diselenggarakan pada tanggal 18 dan 19 Juli di Bandung. Di samping membahas topik tersebut, *Java Instituut* juga menyelenggarakan kegiatan pergelaran kesenian dan pameran ukiran kayu. Pergelaran seni yang dimaksud adalah penampilan tari Banyuwangi, Wayang Wong, dan tonil Sunda lakon *Lutung Kasarung* (Djajadiningrat dkk., 1921, hlm. 253). Di antara ketiga pementasan tersebut, tonil *Lutung Kasarung* mampu mencuri perhatian peserta kongres. Lakon *Lutung Kasarung* pada pementasan tersebut mengadopsi salah satu cerita pantun yang sudah sejak lama dikenal oleh orang Sunda.

Lutung Kasarung diyakini sebagai cerita pantun yang paling sakral dan kramat oleh sebagian besar orang Sunda. Anggapan tersebut berasal dari kepercayaan masyarakat Sunda, bahwa orang yang mengetahui dan berani menceritakan lakon tersebut akan tertimpa “daulat marhu” (kena bala) (Supardi, 2013, hlm. 48). Tokoh utama dari cerita tersebut adalah Purba Sari Ayu Wangi dan Guru Minda/Lutung Kasarung. Perihal kesakralan cerita pantun ini boleh jadi berasal dari muatan

ceritanya yang dipengaruhi sistem kepercayaan Hindu-Buddha-Sunda.

Pada kongres kebudayaan 1921, lakon *Lutung Kasarung* tidak dibawakan dalam bentuk cerita pantun yang diyakini kesakralannya. Panitia bersama pengurus *Java Instituut* membuat konsep baru dengan membalut cerita tersebut menjadi sebuah drama (Sunda; tunil). Secara umum, tunil *Lutung Kasarung* yang diselenggarakan pada kongres tersebut terbagi ke dalam 18 bagian cerita. Setiap bagian cerita diiringi oleh musik tradisional yang disesuaikan dengan isi dan suasana cerita (Djajadiningrat dkk., 1921, hlm. 253). Pementasan tersebut tidak hanya memperkenalkan legenda *Lutung Kasarung*, tetapi juga dijadikan sebagai ajang untuk mempromosikan alat musik Sunda tradisional seperti *Tarawangsa*, *Celempong*, *Rénténg*, *Angklung*, *Degung*, *Suling*, dan *Réngkong*.

Pementasan tunil *Lutung Kasarung* membawa dampak yang cukup signifikan pada kesenian Sunda, khususnya Tunil Tembang. Pemeran dalam tunil tersebut kemudian mendirikan Perkumpulan *Tunil Loetoeng Kasaroeng* (*Tooneel Vereniging Loetoeng Kasaroeng*). Nama tersebut diambil dari pementasan pertamanya pada kongres kebudayaan 1921. Perkumpulan tersebut dipimpin oleh R. Karta Brata guru di HIS (*Hollandsch Inlandsche School*). Setelah pementasannya di bulan Juli, perkumpulan ini sering diundang oleh pejabat daerah. Setelah pementasan bulan Juli 1921, lakon *Lutung Kasarung* juga dipentaskan di beberapa daerah seperti Tasikmalaya, Garut, Cianjur, dan lain sebagainya (Abdulah dkk., 2013, hlm. 300).

Inisiatif *Java Instituut* untuk menyelenggarakan pergelaran kesenian telah menjadi ruang strategis untuk mempromosikan kebudayaan pada suatu daerah, dalam hal ini Sunda. Pasalnya, setelah pementasan *Lutung Kasarung* di tahun 1921, minat masyarakat terhadap pementasan Tunil Tembang semakin meningkat. Bahkan cerita *Lutung Kasarung* sendiri diadaptasi menjadi sebuah film oleh seorang tokoh Belanda di Batavia, yaitu L.

Heuvelcorp. Ia pernah menjadi sutradara pada salah satu film di Amerika sekaligus pemilik dari perusahaan film *NV Java Film Company*. Dalam proses produksi film *Lutung Kasarung* Heuvelcorp menggandeng George Krugers seorang Indo untuk menjadi sutradara. Film ini dirilis di bioskop oleh *NV Java Company* pada tanggal 31 Desember 1926 sampai dengan 6 Januari 1927 (Biran, 2009, hlm. 70). Film *Lutung Kasarung* pada akhirnya menjadi tolok ukur bagi para seniman Belanda saat itu dalam mengembangkan seni perfilman.

2. Penerbitan Majalah Bernuansa Ke-Sundaan (1922-1929)

Java Instituut telah menerbitkan empat majalah dalam upayanya meningkatkan budaya menulis di kalangan masyarakat pribumi. Majalah yang dimaksud adalah *Djawa*, *Poesaka Soenda*, *Poesaka Djawi*, dan *Poesaka Madhoera*. Keempat majalah tersebut mempunyai muatan yang berbeda seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam konteks memajukan kebudayaan Sunda, majalah *Poesaka Soenda* adalah solusi yang ditawarkan oleh *Java Instituut*. Majalah ini berbeda dengan *Djawa* yang cenderung menjadi jurnal ilmu pengetahuan dan budaya bagi *Java Instituut*. *Poesaka Soenda* secara khusus diterbitkan untuk memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan Sunda, seperti kesenian dan kesusastraan. Bahasa yang digunakan dalam majalah ini adalah bahasa Sunda.

Mengenai perlunya majalah berbahasa Sunda, Hoesein Djajadiningrat menjelaskan bahwa “lami-lami koe Java Instituut katimbang perloe ngaloearkeun poestaka-mangsa basa Djawa sareng Soenda, margi anoe kedah tabah kana poesaka-elmoe Djawa teh, sajaktosna sanes anoe lian, nja anoe mibogana tea babakoena mah.” [lama-lama Java Instituut mempertimbangkan perlu mengeluarkan majalah bahasa Jawa dan Sunda, karena yang harus memahami terhadap budaya Jawa itu bukan orang lain, melainkan orang yang memiliki kebudayaan tersebut] (Djajadiningrat dkk., 1923, hlm. 3). Keputusan *Java Instituut*

untuk menerbitkan majalah berbahasa daerah dirasa sangat penting. Pasalnya, bahasa sendiri merupakan salah satu unsur kebudayaan yang menjadi sistem perlambang manusia dalam melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan (Koentjaraningrat, 1990, hlm. 8). Bagi *Java Instituut*, bahasa menjadi salah satu transmisi untuk mempromosikan setiap identitas kebudayaan.

Dewan redaksi dari majalah *Poesaka Soenda* terdiri dari tiga orang, yaitu Hoesein Djajadiningrat, J. Kats, dan Soeriadiradja. Dalam penerbitan majalah-majalah berbahasa daerah, *Java Instituut* melibatkan tokoh-tokoh dari daerah. Seperti pada majalah *Poesaka Soenda* terdapat Soeriadiradja, sedangkan pada majalah *Poesaka Djawi* ada Poerbatjaraka. Dalam majalah *Poesaka Soenda* banyak ditemukan *pupuh*, *wawacan*, *guguritan*, *tembang* dan lain sebagainya. Isinya tentu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ke-Sundaan.

Seperti pada terbitan pertama tahun 1922, terdapat *guguritan* (puisi) yang ditujukan untuk upacara sunat dalam adat Sunda. “Asmarandana- [1] *Sim koering njohoenkeun widi, ka sadaja noe majoenan, badé njelang heula njawér, saméméh ngersakeun toeang, metakeun karasmian, galib talari karoehoen, toeroenan ti Nabi Adam. [2] Metik galibna noe alim, noelad pitoeah pandita, didamel Soendana baé, poegoe poeloenganeunana, mangga kanggo loemajan, aja noe resep ngadangoe, tah kieu ieu oengelna. Kinanti- [3] Poen sapoen ka Sang Roemoehoer, ka Batara ka Batari, ka Batara Naga Radja, ka sadaja Pohatji, ka Goeroe Ratoe sadaja, noe tjalik djadi tjandoli [...]*” (Artinya “Asmarandana- [1] Saya memohon izin, kepada semua yang hadir, akan diselingi dulu dengan nyawer, sebelum mempersilakan makan, menghitung keramaian, lazimnya ini adalah tradisi karuhun, turunan Nabi Adam. [2] Mengambil hal-hal yang bagus, meniru nasihat orang suci, dibuat Sundanya saja, sudah tentu ada yang bisa dipungut, silakan itu lumayan, ada yang suka mendengar, seperti ini katanya. Kinanti- [3] Pun sapun pada Sang

Rumuhun, pada Batara pada Batari (dewa dewi), ke Dewa Naga Raja, ke semua Pohaci (dewa pelindung), ke Guru Ratu semua, yang duduk jadi candoli (juru masak”) (Djajadiningrat dkk., 1922, hlm. 26-27).

Pada masyarakat Sunda kuno puisi sawér biasanya digunakan pada upacara magis/religi untuk menyeru roh-roh yang dianggap baik, makhluk halus, dan leluhur. Hal tersebut bertujuan untuk meminta keselamatan, kemakmuran, ketentraman, dan kebahagiaan. Di sisi lain juga digunakan untuk menjauhkan diri dari roh jahat yang bisa mendatangkan malapetaka (Hadish dkk., 1986, hlm. 16). Melalui majalah *Poesaka Soenda* unsur-unsur kebudayaan Sunda di atas berhasil disebarluaskan.

Pada perkembangannya majalah ini juga digunakan untuk memperkenalkan omongan pépeling atau piloeangeun. Yang dimaksud dengan omongan pépéling adalah bahasa lisan yang biasa diungkapkan oleh orang Sunda untuk tujuan menasihati. Pada masyarakat Sunda ungkapan-ungkapan yang demikian itu disebut dengan “saur sepuh” atau pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh orang tua di masa lalu (Ardiwinata, 1923, hlm. 82). Memasuki tahun 1924, tepatnya setelah Kongres Bahasa Sunda I dilaksanakan, terdapat pergeseran fungsi muatan dari majalah *Poesaka Soenda*. Majalah yang awalnya hanya difokuskan untuk memuat tentang kesenian dan kesusastraan Sunda, mulai menambahkan beberapa muatan baru tentang dialek bahasa Sunda, terjemahan karya intelektual Belanda, dan lain sebagainya.

Pada terbitan ke-4 tahun 1926, majalah *Poesaka Soenda* mulai memperkenalkan dialek-dialek Sunda yang ada di daerah Jawa Barat. Dalam terbitan itu yang diperkenalkan adalah dialek Karawang. Dewan redaksi membuat alih bahasa ke dalam dialek bahasa *Sunda lulugu*, tujuannya agar pembaca yang menggunakan bahasa *Sunda lulugu* (umum) dapat memahaminya. Memasuki tahun 1927, majalah *Poesaka Soenda* juga digunakan untuk

memuat makalah dan laporan kongres bahasa Sunda yang kedua. Pada kongres sebelumnya majalah *Djawa* masih menjadi media utama untuk memuat laporan kongres dan makalah.

Akhirnya di tahun 1929 pengurus *Java Instituut* memutuskan untuk menghentikan penerbitan majalah *Poesaka Soenda*. Mengenai alasan berhentinya penerbitan majalah ini dapat diketahui dalam pidato Hoesein Djajadiningrat di kongres kebudayaan tahun 1929. Dalam beberapa hal *Java Instituut* juga mengalami banyak kesulitan karena umumnya untuk memajukan sebuah kebudayaan harus dilakukan secara berangsur-angsur. Salah satu kesulitan yang dialami oleh *Java Instituut* terletak pada kontribusi penulis di majalah (Djajadiningrat, 1930, hlm. 9). Tokoh-tokoh Sunda yang memberikan kontribusi pemikirannya dalam majalah *Poesaka Soenda* hanya sedikit. Bahkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam kongres bahasa Sunda juga tidak semuanya menjadi kontributor dalam majalah tersebut.

Jika dikaitkan dengan tahun berjalannya majalah ini, dapat diketahui bahwa saat itu juga ada sekitar lima surat kabar berbahasa Sunda lain. Kelima surat kabar tersebut adalah *Tjahaja Pasoendan* (sejak 1912), *Panoengtoen Kamadjoean* (sejak 1913), *Papaes Nonoman* (Pasoendan di tahun 1919), dan *Sinar Pasundan* (sejak 1919) (Ekadjati, 2004, hlm. 57). Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebelum munculnya majalah *Poesaka Soenda*, tokoh-tokoh Sunda juga sudah mempunyai wadah tersendiri dalam memberikan sumbangan pemikirannya. Terlebih pada surat kabar *Tjahaja Pasoendan*, muatan mengenai adat istiadat, *babad*, *wawacan*, dan lain sebagainya sudah sering disoroti. Perlu diingat juga bahwa tokoh Sunda yang terlibat sebagai pengurus *Java Instituut* hanya sedikit. Namun, terlepas dari alasan dihentikannya penerbitan majalah *Poesaka Soenda*, perlu diakui bahwa keberadaan majalah ini telah meninggalkan catatan yang penting mengenai perkembangan kebudayaan Sunda pada tahun 1920-an.

3. Pergulatan Orang Sunda di Kongres Bahasa Sunda (1924-1936)

Sebagai lembaga kebudayaan yang bertujuan untuk memajukan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura, dan Bali. *Java Instituut* dalam perjalanannya telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu program utama dari *Java Instituut* adalah kongres. Untuk memajukan kebudayaan Sunda, bahasa merupakan salah satu yang paling disoroti oleh *Java Instituut*. Oleh sebab itu, *Java Instituut* menyelenggarakan kongres bahasa Sunda sebanyak tiga kali. Kongres pertama diselenggarakan pada tanggal 12-14 Oktober 1924, kongres kedua pada tanggal 8-10 September 1927, dan kongres ketiga dilaksanakan pada tanggal 26-27 September 1936. Ketiga kongres bahasa Sunda tersebut diselenggarakan di Bandung. Catatan mengenai pelaksanaan kongres bahasa Sunda tersebut sebagian besar dapat ditemukan dalam majalah terbitan *Java Instituut*, yaitu *Djawa* dan *Poesaka Soenda*.

Kongres bahasa Sunda pertama dilaksanakan di pendopo Kabupaten Bandung. Antusiasme nampak terlihat pada kongres tersebut, sebanyak 400 orang hadir pada hari pertama kongres. Begitupun dengan pejabat Hindia Belanda ikut menghadiri kongres, seperti Residen, Asisten Residen, Penasihat Urusan Dalam Negeri, Inspektur dan wakil Inspektur Pendidikan Dalam Negeri, para direktur Sekolah Normal di Garut dan Purwakarta dan beberapa orang guru Eropa (Djajadiningrat, dkk., 1925, hlm. 242). Pada kongres bahasa Sunda pertama, pemakalah atau pemrasaran diisi oleh tokoh-tokoh Sunda, seperti R. Poeradiredja, Mangoendikaria, R. K. A. Soeriawinata, R. Moeh. Moehidin, R. H. Soemadipradja, R. Djajadiredja, dan M. Soeriadiradja. Pembahasan dalam kongres ini difokuskan untuk membahas hal-hal fundamental terkait bahasa Sunda.

Poadiredja menyampaikan gagasan mengenai karakter bahasa Sunda. Karakter tersebut menurutnya harus dipertahankan sebagai identitas dari orang Sunda. Kemudian,

Mangoendikaria memberikan pengenalan kata-kata umum ke dalam bahasa Sunda. Pendapat Mangoendikaria ini selaras dengan yang dikemukakan oleh pembicara selanjutnya, yaitu Soeriawinata. Ia mengharapkan agar disusun suatu daftar "kata-kata" tinggi dan penggunaannya, serta kamus bahasa Sunda yang dilengkapi dengan penjelasannya (Djajadiningrat, dkk., 1925, hlm. 242). Pembahasan awal dari ketiga tokoh Sunda di atas mencerminkan bahwa pada masa itu belum ada standarisasi dalam bahasa daerah. Maka tidak mengherankan apabila para pemakalah membahas sampai pada hal-hal mendasar, yaitu berkaitan dengan dialek atau kata-kata yang sebaiknya digunakan dalam bahasa Sunda.

Moeh. Moehidin seorang tokoh Sunda yang menjadi pengawas sekolah di Batavia berhalangan untuk hadir. Tetapi, ia telah mengirimkan makalah kepada panitia yang berisi pengenalan kelompok kata berbeda di bahasa Sunda menurut usia, jabatan, dan lainnya. Sementara itu, Soemadipradja memaparkan kesalahan-kesalahan umum dalam tembang Sunda dan cara membuat tembang Sunda yang baik. Kemudian, R. Djajadiredja memperkenalkan pokok bahasan mengenai ejaan bahasa Sunda dalam aksara Sunda-Jawa. Permasalahan mengenai bahasa Sunda yang dijelaskan oleh pembicara sebelumnya nampak terangkum pada gagasan Soeriadiradja. Ia menjadi pembicara terakhir dalam kongres dan menyampaikan tentang perlunya membentuk perkumpulan yang disebutnya dengan "Sastra Winangoen" (Djajadiningrat, dkk., 1925, hlm. 243). Komite ini dikhususkan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Sunda.

Kongres Bahasa Sunda I melahirkan sebuah mosi yang terdiri dari tujuh poin rekomendasi, yaitu 1) Pengajaran bahasa Sunda dijadikan mata pelajaran utama di sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar; 2) Di sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa

pengantar, nilai pengetahuan bahasa Sunda para siswa tidak boleh terlalu rendah dibandingkan dengan nilai pengetahuan bahasa Belanda; 3) Pengajaran bahasa asing di sekolah-sekolah VIO dan MULO serta di Sekolah Tinggi Hukum dipercayakan kepada guru-guru yang telah mendapat pelatihan yang sesuai; 4) Kursus pelatihan untuk guru-guru bahasa ibu, yang dulu pernah ada, akan diadakan kembali dan, jika mungkin, diorganisir dengan cara yang lebih baik daripada sebelumnya; 5) Buku-buku pelajaran untuk sekolah-sekolah tidak akan ditentukan oleh Departemen, tetapi pilihan buku-buku tersebut akan diserahkan kepada para guru yang bersangkutan dengan syarat-syarat tertentu; 6) Semua orang yang bertanggung jawab untuk mengajar atau menjadi penilik sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi murid-murid bumiputra harus telah mempelajari bahasa nasional; 7) Bahasa Sunda akan diperkenalkan sebagai mata pelajaran di Sekolah Tinggi Hukum (Djajadiningrat, dkk., 1925, hlm. 44).

Mosi di atas menjadi penutup dari kongres bahasa Sunda pertama yang memfokuskan pembahasan pada perkembangan bahasa Sunda dan penggunaannya, baik secara praktis ataupun estetis. Dalam menindaklanjuti permasalahan mengenai dialek bahasa Sunda, *Java Instituut* telah mewadahi gagasan-gagasan tersebut pada majalah *Poesaka Soenda*. Terhitung sejak tahun 1925 majalah tersebut tidak hanya memuat karya-karya sastra Sunda saja, tetapi mulai diperluas cakupannya untuk mewadahi dialek-dialek bahasa Sunda. Dalam majalah *Poesaka Soenda* terbitan April 1925 sudah memuat Oenak-anik basa Soenda (istilah-istilah dalam bahasa Sunda) yang disusun oleh Sastrawinangoen.

Pada Kongres Bahasa Sunda II, ruang lingkup pembahasan diperluas. Mengenai dialek Sunda masih masuk dalam agenda kongres. Tetapi, di bagian lain sastra Sunda dan pengajaran bahasa Sunda di sekolah menjadi topik utama di kongres ini. KBS II diselenggarakan pada tanggal 8-10 September 1927 di Bandung. *Java Instituut* memilih tokoh-tokoh Sunda untuk

menjadi panitia penyelenggara, yang terdiri dari R. Sastraatmadja, M. Padmadinata, M. Karta Atmadja, R. Moechlis, R. Prawira Soetignja dan M. Sastradipoera. Sementara itu, pengurus *Java Instituut* yang menghadiri kongres adalah Hoesein Djajadiningrat, Samuel Koperberg, dan J. Kats (Djajadiningrat, dkk. 1927, hlm. 70).

Sehubungan dengan beberapa saran yang disampaikan pada KBS I, Hoesein mengumumkan beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh *Java Instituut*. Terkait permohonan untuk mengajarkan bahasa Sunda di sekolah hukum, *Java Instituut* telah melakukan koordinasi dengan Direktur Pendidikan dan Keagamaan. Hasilnya, pemerintah memberikan kesempatan pada sekolah-sekolah hukum untuk mengikuti kursus ataupun pelajaran bahasa Sunda dan bahasa daerah lainnya. Selanjutnya, *Java Instituut* juga telah membentuk komite "Sastrawinangoen" dengan bertugas untuk mempelajari subjek-subjek yang berhubungan dengan bahasa Sunda. Hasil dari kajian komite tersebut dapat dimuat dalam majalah *Poesaka Soenda* (Djajadiningrat dkk., 1927, hlm. 174). Dengan demikian, melalui penjelasan Hoesein di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar mosi yang disampaikan pada KBS I telah direalisasikan oleh *Java Instituut*.

Jalannya KBS II diawali oleh Soeriadiradja, ia membuat makalah mengenai penggunaan bahasa Sunda lulugu. Bahasa *lulugu* adalah bahasa yang biasa dipergunakan dan diterima oleh orang Sunda secara keseluruhan, atau dengan kata lain bisa dikatakan sebagai bahasa pokok (Sumantri dkk., 1985, hlm. 272). Hasan Soemadipradja, melanjutkan pembahasan dalam kongres mengenai bahasa Sunda *lemes*. Tidak banyak komentar yang ia berikan, karena dari KBS I penggunaan bahasa *lemes* telah meningkat, seiring dengan diperkannya bahasa Sunda *lemes* dalam majalah *Poesaka Soenda*. Pada pembahasan mengenai tembang dan kawih Sunda, Satjadibrata, Hasan Soemadipradja, Soeriawidjaja, Moehidin, dan Ios Wiriatmadja lebih mengedepankan sisi teknis dan praktis.

Djajadiredja, Prawiradinata, dan Satjadibrata membawakan topik mengenai pengajaran bahasa Sunda di sekolah. Pembahasan yang disampaikan oleh ketiganya tidak terlalu rinci. Tetapi, bersifat teknis sesuai dengan pengalamannya mengajar. Prawiradinata dan Satjadibrata menginginkan adanya penyusunan kamus bahasa Sunda yang dalam penyusunannya tidak hanya melibatkan guru tetapi juga komite tertentu. Sementara itu, Djajadiredja lebih menekankan pada kompetensi guru bahasa daerah di sekolah-sekolah. Pada kasus yang ia temui di sekolah-sekolah biasa, seorang guru bahasa Jawa dipercaya untuk mengajar berbagai mata pelajaran. Di sisi lain, ia juga harus membuat karya dalam bahasa Melayu dan Sunda. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kualitas pengajaran yang diberikan (Djajadiningrat dkk., 1927, hlm. 179). Sebagian besar peserta sepakat dengan kajian yang disampaikan oleh pemakalah. Sementara itu, beberapa orang ingin mengajarkan berbagai dialek bahasa daerah di MULO.

Sama seperti halnya KBS I di tahun 1924, KBS II juga menghasilkan mosi yang diajukan oleh peserta kongres kepada Direktur Pendidikan dan Keagamaan. Kali ini mosi yang diajukan oleh peserta cenderung menyoroti pengajaran bahasa di sekolah-sekolah. Mosi tersebut mencakup poin-poin sebagai berikut: 1) Sesegera mungkin, inspeksi pengajaran bahasa pribumi ditugaskan kepada tenaga pribumi; 2) Pemerintah harus segera mengadakan pelatihan guru-guru bahasa Sunda; 3) Harus ada guru yang terlatih mengajar bahasa daerah tanpa harus mengajar mata pelajaran lain; 4) Penyusunan buku pelajaran dan buku panduan mengajar harus disusun dengan sungguh-sungguh; 5) Hanya guru-guru berbahasa Sunda yang akan ditempatkan di sekolah basis wilayah Sunda; 6) Pemerintah harus segera menyusun kamus bahasa Sunda; 7) Murid-murid Sunda di MULO akan diwajibkan mengikuti pelajaran bahasa Sunda (Djajadiningrat dkk. 1927, hlm. 367).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya kongres bahasa, pemikiran orang Sunda untuk memajukan bahasanya dapat terwadahi. Di lain pihak keberadaan *Java Instituut* sebagai lembaga studi kebudayaan saat itu terbukti strategis dalam mendorong kemajuan bahasa Sunda. Merujuk pada hasil KBS I, pengurus *Java Instituut* sebagian besar telah merealisasikan usul yang disampaikan oleh peserta seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada KBS II mosi yang diajukan lebih menekankan pada aspek pengajaran bahasa Sunda di sekolah. Selain dipandang sebagai salah satu ruang strategis untuk mengajarkan bahasa Sunda, sekolah juga dianggap penting untuk tujuan mempromosikan bahasa. Hal ini seperti yang terjadi pada bahasa Belanda, meningkatnya penggunaan bahasa tersebut tidak terlepas dari pengajaran bahasa di sekolah.

Kongres Bahasa Sunda kembali diselenggarakan pada 26-27 September 1936 di Bandung. Sama seperti dua KBS sebelumnya, *Java Instituut* menunjuk tokoh-tokoh Sunda untuk menjadi panitia kongres. R. A. A. Wiranata Koesoema (Bupati Bandung) dipilih untuk menjadi ketua kehormatan. Sementara itu, ketua panitia kongres dijabat oleh R. Moehamad Enoch (Direktur Pekerjaan di Bandung), sekretaris merangkap bendahara dijabat oleh Soemitro (Pengawas sekolah pribumi di Bandung) (Djajadiningrat, dkk. 1936, hlm. 211). Untuk keanggotaannya mayoritas diisi oleh pengurus Paguyuban Pasundan dan beberapa tokoh Sunda lain yang ditetapkan oleh panitia.

Kongres Bahasa Sunda III berbeda dengan dua kongres sebelumnya. Pembahasan dalam KBS III tidak lagi bersandar pada hal-hal mendasar mengenai bahasa Sunda. Tetapi, cenderung mengarah pada penggunaan bahasa Sunda secara praktis di lapangan. Dalam hal ini pengurus *Java Instituut* dan panitia telah menetapkan dua pembahasan pokok untuk dikaji oleh pembicara dan peserta kongres, yaitu terkait perlunya bahasa Sunda sebagai bahasa resmi di dewan kabupaten dan

cara mempromosikan bahasa Sunda sesuai perkembangan zaman (*De Indische Courant*, 1936). Pelaksanaan Kongres Bahasa Sunda III mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Sunda. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah peserta yang menghadiri kongres. Pada hari pertama kongres, sebanyak 500 orang turut menghadiri, termasuk utusan dari dewan kabupaten di Jawa Barat dan utusan-utusan lainnya (Djajadiningrat dkk. 1936, hlm. 211).

Wiranata Koesoema memberikan kata sambutan dan mengulas secara singkat capaian-capaian yang telah dihasilkan dari dua kongres sebelumnya. Menurut data yang ia kumpulkan bersama dengan dewan kabupaten lainnya, di sekolah-sekolah buku bahasa dan bacaan berbahasa Sunda telah disusun dan disebarluaskan. Pada bagian lain, buku tembang Sunda yang menjadi permohonan dari peserta kongres sebelumnya telah diperkenalkan di sekolah-sekolah. Terkait permasalahan kompetensi guru bahasa juga sudah ditangani oleh pemerintah dengan menyelenggarakan pelatihan di Lembaga Bahasa Pribumi di Batavia (Djajadiningrat dkk., 1936, hlm. 212). Hal terpenting dari dua penyelenggaraan kongres sebelumnya adalah meningkatnya penggunaan bahasa Sunda di kalangan masyarakat. Dalam berbagai pertemuan yang dilakukan oleh dewan kabupaten dan perkumpulan-perkumpulan, bahasa Sunda digunakan sebagai resmi untuk komunikasi.

Pada kongres ini orang Sunda terbagi ke dalam dua kelompok yang masing-masing menunjuk pro dan kontra perihal penggunaan bahasa Sunda sebagai bahasa resmi di dewan kabupaten. Kd. A. Karna (bupati Serang), Adiwinata (Parindra cabang Bandung), Atik Soardi (V.B. P.S.I), Sastraatmadja (Muhammadiyah), Hoesen (bupati Karawang), Soeriadilaga (dewan kabupaten Sumedang), Soetalaksana (Muhammadiyah) dan Kd. Oewon Satiapoetra (Bupati Garut) (Djajadiningrat dkk., 1936, hlm. 213). Tokoh-tokoh tersebut tidak sepakat dengan pertanyaan yang diberikan oleh pihak panitia, sekaligus

memberikan kritik terhadap pembahasan Soeriadiradja yang mengedepankan etnisitas dalam pemerintahan.

Sementara itu, tokoh-tokoh yang mendukung usulan di atas di antaranya adalah Enoeng Nataatmadja (Pasundan Bandung), Sastrawinata (Taman Siswa Bandung), Djajamihardja (Dewan Pengurus Serikat Pekerja di Batavia), Soepjan Iskandar (Pasundan Tasikmalaya), Wiriatmadja (Regenthoogeschool), Djajasoebrata, Moehammad Satari, Winatapoetra (bupati Cianjur), dan Iskandardinata (Kepala Administrasi Pasundan). Secara umum tokoh-tokoh yang menyetujui penggunaan bahasa Sunda di dewan kabupaten beranggapan bahwa, memang sudah seharusnya para pejabat di Sunda menggunakannya. Pengajaran di sekolah tidak cukup untuk mempromosikan bahasa Sunda, maka dari perlu ada contoh konkret dari para petinggi yang biasanya lebih dipandang oleh kebanyakan masyarakat. Sementara itu, beberapa tokoh lain menyetujui dengan syarat tertentu. Seperti Enoeng Nataatmadja, ia mendukung penggunaan bahasa Sunda di dewan kabupaten. Tetapi, harus memperhatikan juga anggota dewan kabupaten non-Sunda yang tidak mengerti dan memahami bahasa Sunda.

Perdebatan dalam kongres tersebut menemui ujungnya, setelah ketua panitia kongres mengambil beberapa kesimpulan dari diskusi yang telah dilakukan. Ketua juga menyerahkan hasil keputusan kepada peserta kongres. Sama seperti dua kongres sebelumnya, pada KBS III juga menghasilkan sebuah mosi. Pada KBS III terdapat dua mosi yang diajukan oleh peserta dengan suara bulat. *Pertama*, penggunaan bahasa Sunda di Dewan Kabupaten sebaiknya tetap dilaksanakan. Tetapi, harus ada pengecualian bagi kabupaten yang sebagian masyarakatnya bukan pengguna bahasa Sunda. *Kedua*, terkait promosi bahasa Sunda dapat melalui beberapa cara seperti memluas pendidikan bahasa di sekolah, mendirikan kursus, dan menyusun buku pelajaran berbahasa Sunda (Djajadiningrat dkk., 1936, hlm. 216).

Dalam pembahasan mengenai Kongres Bahasa III di atas, dapat diketahui bahwa bahasa Sunda terus mengalami perkembangan secara praktis dan teoritis. Jika dilihat dari pola pembahasan dalam kongres, KBS I dan II merupakan pertemuan untuk membahas dasar-dasar dalam berbahasa Sunda. Dua kongres sebelumnya masih mencantumkan pembahasan mengenai pengembangan dialek bahasa Sunda. Pembahasan tersebut tidak ada dalam KBS III yang cenderung bersifat praktis bahkan politis. Dikatakan praktis karena KBS III menekankan pembahasan pada penggunaan bahasa Sunda sebagai bahasa resmi di kalangan dewan kabupaten dan masyarakat secara umum. Sementara itu, unsur politis terdapat pada pemikiran tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Dalam kongres tersebut orang Sunda terbagi dalam dua kelompok, antara kubu pro dan kontra.

KBS III menjadi yang terakhir dalam rangkaian langkah strategis *Java Instituut* untuk memajukan kebudayaan Sunda pada ranah kongres. Setelah tahun 1936, tidak ditemukan catatan yang menunjukkan kelanjutan dari KBS. Catatan mengenai KBS, baru ditemukan kembali setelah Indonesia merdeka tepatnya pada tahun 1952. Di mana penyelenggara dari kongres tersebut bukan *Java Instituut*, melainkan Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda (LBSS).

4. Menggalang Kreativitas Pribumi melalui Sekolah Kesenian dan Kerajinan Tangan (1939-1941)

Pasca Kongres Bahasa Sunda III (1936) dan Kongres Kebudayaan Bali (1937), *Java Instituut* tidak pernah menyelenggarakan kegiatan serupa sampai dengan tahun 1941. Hal ini dapat terjadi karena pada sekitar tahun 1930-an pemerintah Hindia Belanda sedang mengalami krisis keuangan dan masa itu lebih dikenal dengan sebutan “zaman malaise”. Di samping itu ada faktor lain yang menyebabkan tidak adanya kegiatan *Java Instituut* menjelang tahun 1940-an, yaitu faktor politik menjelang pecahnya Perang Dunia II. Meskipun pada Perang Dunia II Belanda memilih besikap

netral, tetapi mereka tetap mendapatkan serangan dari Nazi Jerman. Invasi tersebut tidak terlepas dari kepentingan Jerman untuk mengepung Prancis. Hitler menganggap bahwa dengan menguasai Belanda, maka jalan mereka untuk menaklukkan Prancis menjadi mudah. Oleh sebab itu, pada tanggal 10 Mei 1940 Nazi Jerman menyerbu Belanda. Pemerintah Belanda lari ke pengasingan di London.

Sementara itu, di Indonesia pemerintah kolonial memberlakukan undang-undang darurat perang dan segala rapat politik umum dilarang (Ricklefs, 2005, hlm. 399). Kondisi yang demikian turut mempengaruhi operasionalisasi *Java Instituut*. Pasalnya, sumber keuangan lembaga tersebut mayoritas berasal dari subsidi pemerintah kolonial. Selain itu, perlu diingat juga bahwa kongres kebudayaan dan bahasa tidak hanya menjadi ruang diskursus kebudayaan. Terkadang pembahasan dalam kongres pun seringkali menyinggung ranah politik.

Meskipun tidak ditemukan kembali kongres-kongres dari *Java Instituut*, tetapi lembaga ini masih produktif dalam mengelola program lainnya. *Majalah Djawa* sebagai berkala ilmu pengetahuan dan budaya setidaknya masih eksis hingga tahun 1941. Begitupun pada tahun 1939, ditemukan catatan dalam majalah *Djawa* mengenai rencana *Java Instituut* untuk mendirikan sekolah seni dan kerajinan (*Kunst Ambachtsschool*) (Djajadiningrat dkk., 1939, hlm. 117). Tujuan dari sekolah ini adalah untuk melatih lebih lanjut para pengrajin terampil dari Jawa, Sunda, Madura, dan Bali. Melalui pendidikan praktis diharapkan mampu memajukan perkembangan “kerajinan”, baik dalam arti ekonomi maupun dalam arti teknis dan artistik (Dibjapranata, Koperberg, Moens, & Poerbaja, 1940, hlm. 34).

Pengurus *Java Instituut* mengajukan permohonan kepada pemerintah melalui *Volksraad* untuk mendapatkan izin pendirian sekolah tersebut. Pada tahun 1940, pemerintah memberikan izin kepada *Java Instituut* untuk mendirikan *Kunst Ambachtsschool*. Secara resmi sekolah seni ini baru dibuka pada tanggal

1 Maret 1941. Peresmian sekolah ini dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sebagai pelindung sekolah ditunjuk Paku Alam VII (K.G.P.A.A Praboe Soerjadilaga) yang saat itu menjadi dewan pengurus *Java Instituut*. Dari sekolah ini berbagai macam kesenian diajarkan sebagai bagian dari konsentrasi kepada muridnya. Sekolah ini menampung murid dari berbagai daerah, khususnya wilayah kebudayaan yang dinaungi oleh Java Instituut.

Pada tahun 1940 terjadi perubahan pada struktur redaksi majalah Djawa. Hoesein Djajadiningrat tidak lagi menjadi ketua redaksi majalah tersebut, terhitung dari tahun 1940. Susunan dewan redaksi terbaru diisi oleh R. Sidarta Dibjapranata, BPH Poerbaja, Samuel Koperberg, dan J. L. Moens. Pada tahun 1941, tepatnya pada bulan Desember penerbitan majalah Djawa dihentikan karena semakin berkurangnya kontributor. Jika melihat konteks zamannya, di tahun 1940-1941 kondisi sosial politik di Hindia Belanda mulai tidak menentu. Pemerintah kolonial mulai mengalihkan fokusnya pada pertahanan militer.

SIMPULAN

Java Instituut melakukan berbagai langkah strategis untuk memajukan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura, dan Bali. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan kongres bahasa dan kebudayaan, menerbitkan majalah, pentas seni, dan mendirikan sekolah kesenian. Pada ranah kebudayaan Sunda, Java Instituut telah menyelenggarakan kongres bahasa Sunda sebanyak tiga kali. Kongres tersebut sangat penting dalam perkembangan bahasa Sunda. Pasalnya, dasar-dasar mengenai bahasa Sunda yang saat ini kita kenal di sekolah dan masyarakat umumnya banyak dirumuskan pada ketiga kongres tersebut. Selain itu, Java Instituut juga menerbitkan majalah berbahasa Sunda, yaitu *Poesaka Soenda*. Secara umum, majalah ini membuat berbagai macam sastra Sunda. Pada perkembangannya majalah ini juga dimanfaatkan sebagai beranda ilmu pengetahuan oleh beberapa tokoh Sunda. Keberadaan Majalah ini menandai bangkitnya

kajian keilmuan dan kesusastraan Sunda pada masa pergerakan nasional.

Pada ranah kesenian, Java Instituut turut mengembangkan tunil (tonil dalam bahasa Indonesia) dan alat musik Sunda. Pementasan tonil lakon Lutung Kasarung oleh *Java Instituut* membawa dampak yang signifikan bagi perkembangan opera Sunda. Lakon tersebut menginspirasi pembuatan film *Lutung Kasarung* oleh produser film Belanda, yaitu Thomas Gericke. Hal itu menjadi titik penting dalam perkembangan awal industri film di Indonesia. Sementara itu, pementasan alat musik Sunda di setiap kongres bahasa juga sangat penting dalam perkembangan seni musik Sunda. Pasalnya, pementasan tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi peserta kongres, lebih dari itu menjadi media dalam mempromosikan alat musik Sunda di masyarakat. Selain itu, *Java Instituut* juga turut melahirkan sekolah kesenian dan kerajinan tangan. Meskipun, sekolah ini tidak dikhususkan bagi orang Sunda. Tetapi, keberadaannya sangat mendukung terhadap keahlian serta kreativitas dari orang Sunda.

REFERENSI

- Abdulah, T. dkk., (2013). Gending karesmen: teater tradisional menak di priangan 1904-1942. *Jurnal Panggung*, 23(3), 294-308.
- Alatas, S. H. (1998). *Mitos pribumi malas*. LP3ES.
- Ardiwinata, D. K. (1923). Poesaka anoe toeroen temoeroen. *Majalah Poesaka Soenda*. Java Instituut.
- Aurousseau, L., & Parmentier, H. (1922). Djawā. driemaandelijksch tijdschrift, orgaan van het java-instituut. *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient*, 22(1), 260-261.
- Biran, M. Y. (2009). *Sejarah Film 1900-1950: bikin film di jawa*. Komunitas Bambu.
- Dibjapranata, R. S. dkk. (1940). *Kunst ambachtsschool. djawa tijdschrift*. Java Instituut.

- Djajadiningrat, H. dkk (1939). *Oprichting kunst ambachtsschool. djawa tijdschrift*. Java Instituut.
- Djajadiningrat, H. dkk. (1921). "Het java-instituut". *Djawa Tijdschrift*. Java Instituut.
- Djajadiningrat, H. dkk. (1921). Over het cultuurcongres te bandoeng. *Djawa Tijdschrift*. Java Instituut.
- Djajadiningrat, H. dkk. (1922). Goegoeritan paranti njawer. *Majalah Poesaka Soenda*. Java Instituut.
- Djajadiningrat, H. dkk. (1923). Kongres basa soenda. *Majalah Poesaka Soenda*. Java Instituut.
- Djajadiningrat, H. dkk. (1924). Vergadering van de soendasch taalcongres. *Djawa Tijdschrift*. Java Instituut.
- Djajadiningrat, H. dkk. (1925). Verslag van de soendasch taalcongres. *Djawa Tijdschrift*. Java Instituut.
- Djajadiningrat, H. dkk. (1927). Kongres basa soenda II. *Majalah Poesaka Soenda*. Java Instituut.
- Djajadiningrat, H. dkk. (1927). Tweede soendasch taalcongres. *Djawa Tijdschrift*. Java Instituut.
- Djajadiningrat, H. dkk. (1936). Verslag van de taalcongres te bandoeng. *Djawa Tidschrift*. Java Instituut.
- Ekadjati, E. S. (2004). *Kebangkitan kembali orang sunda: kasus paguyuban pasundan 1913-1918*. Kiblat Buku Utama.
- Hoofdredacteur. (1919, 20 Desember). "Het Java-instituut". *De Locomotief*, hlm. 2
- Hoofdredacteur. (1919, 7 Agustus). "De stichtlagsbijeemkomst van het Java Instituut". *Bataviaasch Nieuwsblaad*, hlm. 6
- Ismaun., Winarti, M., & Darmawan, W. (2016). *Pengantar ilmu sejarah*. Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah.
- Koentjaraningrat. (1990). *Beberapa Antropologi Sosial*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Niel, R. V. (2009). *Munculnya elit modern indonesia* (Terj. Z. D. Noer & B. Rasuanto). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Poesponegoro, M. D. & Notosusanto, N. (2010). *Sejarah nasional indonesia v*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasisko, Y. G. (2019). Demokrasi indonesia dalam masyarakat multikultural. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 3(1), 1-12.
- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah indonesia modern 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Sumantri, M. dkk., (1985). *Kamus sunda-indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.
- Supardi, N. (2013). *Bianglala budaya: rekam jejak 95 tahun kongres kebudayaan*. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud.
- Tsuchiya, K. (1990). Javanology and the Age of Ranggawarsita: An introduction to nineteenth-century javanese culture. Dalam A. Kahin, R. Ludgate, & D. Millar (Penyunting), *Reading Southeast Asia* (hlm. 75-108). Cornell University.
- Wijayanto, C. W. (2006). Sejarah java instituit dalam perspektif discourse orientalis (1919-1941). (*Skripsi*). Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.